

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No.3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama. 2008.

------. *Pemahaman Terhadap Bentuk SKMHT*, Bandung, Mandar Maju. 2019.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press. 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan Kesebelas*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2006.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2008.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Cetakan 15. Yogyakarta. 2014.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004.

Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2017.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004.

Soemoatmodjo, Soetarjo. *Apakah notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty*, Yogyakarta. Liberty. 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2007

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015.

Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004.

Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. 2011.

Uswatun Hasanah. *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang. Setara Press. 2021.

B. Artikel, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Makalah, Jurnal

Adzin Askhian, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Tinjauan Praktik Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magisker Kenotariatan, 2020.

Dwi Aulia Destiana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Oleh Notaris Dengan Mencantumkan Kop Notaris”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magisker Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Gusriadi dan Taufiq El Rahman, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Terdegradasi Sebagai Akta Bawah Tangan”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Volume 37, No. 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

I Putu Eka Damara dan A.A. Gede Oka Parwata, “Tanggung jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Hukum”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 3, No. 1, 2015.

Nur Azizah, Abdul Halim Barkatullah dan Noor Hafidah. “Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara)”. Jurnal Notary Law Journal Volume 1 Issue 2, Universitas Lambung Mangkurat, 2022.

Rana Zahra Gina, “Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/PT YYK Juncto Putusan No.771K/Pdt/2018)”, Jurnal Indonesian Notary, Volume 2, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2020.

Yanti Jacline Jennier Tobing, “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Indoenesie* (BW)).

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara No.117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No.4432)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara No.3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No.5491).

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara No.42, Tambahan Lembaran Negara No.3632).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara No.59 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No.3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara No.120 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No.5893).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 349).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 986).